

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdoel Djamali, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1984.

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004

A.Hamid S Attamini, *Peranan Keputusan Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990.

Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Adminitrasi dan Hukum Adminitrasi*, Alumni Bandung, 1990

Benyamin Hoessein, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi Ke Demokrasi?.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara. Fisip UI. 5 September 1995

Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2009

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*,. Sinar Grafika, Jakarta 2012

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

M Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Muktie Fadjar, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesia administration law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

R. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibia, Bandung, 2008

RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1978

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Syaukani, HR et.el., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid 111, Gunung Agung, Jakarta 1968

Van der pot, *Nederlandch Bestuursrecht*, 1934

W.P Prins (terj. R. Kosim Adisapoetra), 1983

A. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 *Tentang asas-asas umum pemerintah yang baik*

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, *tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Izin di Daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2928/K/30/MEM/2011 *Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk*

Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 01.E/30/djb/2015 *Tentang Perubahan status izin usaha pertambangan dalam rangka Penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing*

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj, tanggal 16 Januari 2015 *Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Pengumuman Dirjen Mineral Dan Batubara Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 *Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Ke-Delapanbelas Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Walikota.*

B. Sumber Lain

<http://www.rakyatpos.com/kip-serbu-matras-pemkab-angkat-tangan.html>

<http://www.timah.com/operasi-ekplorasi>

<http://www.bangka.go.id/kondisi-geografis>

<http://www.timah.com/operasi-ekplorasi>

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1773-korsup-minerba-upaya-kpk-cegah-korupsi-pertambangan>

<https://www.minerba.esdm.go.id/library/Penetapan-dan-pencabutan-CNC>

<http://walhibangkabelitung.blogspot.co.id//kerusakan-lingkungan-laut-bangka>

<http://bangkakab.bps.go.id/perekonomian>

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan>

